

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.
<https://bpkad.pekanbaru.go.id>

Badan Pusat Statistik. (2021a). *Berita Resmi Statistik: Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Desember 2020*.

Badan Pusat Statistik. (2021b). *Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020*.

Fahmi, Irham. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.

Habibi, K. A., Imtikhanah, S., & Hidayah, R. (2015). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Saat Covid-19*. 122–147.

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat

Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik - Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Hatmoko, A. W. (2021). Model Konseptual Analisis Kinerja Keuangan Pemrov DIY Sebelum dan Sesudah Menerima Danais. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 3, 13–30.
<https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art2>

Hendriko, D. P. (2021). *Analisa Dan Klasifikasi Kemampuan Keuangan*

- Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Dalam Era Otonomi Daerah. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & ...*, 1, 211–218.
<https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/sneba/article/view/2760>
- Herispon. (2020). *Dampak ekonomi pembatasan sosial berskala besar terhadap masyarakat kota pekanbaru di provinsi riau.*
- Indrayani, I., & Khairunnisa, K. (2019). Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value for Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe: (Studi Kasus Pada Dpkad Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 1.
<https://doi.org/10.29103/jak.v6i1.1820>
- Internasional Monetary Fund. (2020). *World Economic Outlook.*
- Internasional Monetary Fund. (2021). *World Economic Outlook.*
- Internasional Monetary Fund. (2022). *World Economic Outlook.*
- Lintang, V. A. L. (2021). Analisis Tata Kelola Keuangan Negara di Masa Pandemi Covid-19. *Juripol*, 4(1), 310–319. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11050>
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah-Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta:BPFE.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta : CV Andi Offset
- Mengkuningtyas, Y. (2014). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah*

Daerah Kota/Kabupaten Di Indonesia Sebelum Dan Setelah Pemekaran.
14(02), 144–150.

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial.*

Pramita, P. (2015). Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013 Skripsi. *Skripsi, 3, 2015.*
<http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000>

Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Among Makarti, 7, 83–112.*

Purba, S., & Hutabarat, R. C. (2017). Jurnal Ilmiah Kohesi Vol. 1 No. 1 April 2017.
Ilmiah Kohesi, 1(1), 95–103.

Puspita, W. D., & Pangastuti, D. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Among Makarti, 15(1), 90–104.* <https://doi.org/10.52353/ama.v15i1.246>

Putri, T. K., Boedijono, & Rohman, H. (2014). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah. *Jurusan Ilmu Administrasi.*

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010

Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Republik Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah

Republik Indonesia. 2020. Peraturan Presiden No.82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus

Republik Indonesia. 2020. Instruksi Presiden No 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan corona virus disease 2019 (covid-19).

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010

Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Republik Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah

Republik Indonesia. 2020. Peraturan Presiden No.82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus

Republik Indonesia. 2020. Instruksi Presiden No 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan corona virus disease 2019 (covid-19).

Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(2), 147. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v7i2.1207>

Sartika, N., & Pratama, A. I. (2019). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012 - 2016. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 179–188. <https://doi.org/10.31294/moneter.v6i2.6494>

Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi*

Pembangunan, 18(2), 93–101.

<https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2527>

Syahara, B. Q., & Aufa, M. (2022). *Provinsi Jawa Timur Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19*. 38(1), 27–38.

Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83–90.

<https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>

Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. *Ekombbis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 187–195. <https://doi.org/10.37676/ekombbis.v4i2.284>

